



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

---



---

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950  
email: jakarta@ptun.org

## KATA PENGANTAR

Pertama–tama kami panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi birokrasi bersih dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif maka setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan program kerja selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”**.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 10 Januari 2022

KETUA,  
  
INDARYADI, S.H., M.H  
NIP. 196902251991031004

## DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengantar

Daftar isi

**BAB I      Pendahuluan**

**BAB II     A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
4. Keadaan Perkara Tingkat PK

**B. Penyelesaian Perkara**

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan )**

1. POSBAKUM
2. Perkara Prodeo

**BAB III    Sumber Daya Manusia**

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

1. Mutasi
2. Promosi, Pensiun
3. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

**BAB IV    Pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana dan Teknologi Informasi**

1. Pengelolaan Keuangan
2. Pengelolaan Saran dan Prasarana
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
  - Implementasi E Court
  - Implementasi SIPP

**BAB V     Peningkatan Pelayanan Publik**

1. Akreditasi Penjaminan Mutu
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Inovasi Pelayanan Publik

**BAB VI    Pengawasan**

- A. Internal
- B. Evaluasi

**BAB VII   Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Kebijakan Umum Peradilan**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI, Sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021.

### **Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan Tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki **visi** dan **misi** yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
YANG AGUNG”***

## **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, dan Modern;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Rencana Strategis**

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - c. Persentase penurunan sisa perkara
  - d. Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)
  - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase salinan Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
  - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
  - c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan; Indikator / Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase Putusan
  - Persentase Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindak lanjuti.

Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada akhir tahun 2020 PTUN Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak 72 Perkara dan pada tahun 2021 di terima / masuk 314 Perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak **72 Perkara + 314 Perkara = 386 Perkara**

Proses penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Perkara yang harus di proses / di selesaikan **386 Perkara**

b. Proses Penyelesaian Perkara :

- Putus Tahun 2021 .....	206 Perkara
- Dismissal .....	20 Perkara
- Di cabut Tahun 2020 .....	74 Perkara
Total	<u>300 Perkara</u>
Sisa perkara pada tahun 2021 .....	86 Perkara

### Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa Perkara yang di Mohonkan Banding pada tahun 2020 sebanyak **66 Perkara**, dan pada tahun 2021 telah diterima perkara yang dimohonkan banding sebanyak **125 Perkara**;

a. Total jumlah perkara yang di mohonkan Banding :

**66 Perkara + 125 Perkara = 191 Perkara**

b. Perkara yang dimohonkan Banding, yang di putus oleh PTTUN Jakarta dan telah dilakukan pengadministrasiannya oleh PTUN Jakarta sebanyak **125 perkara**.

c. Perkara Banding yang di Cabut **3** perkara.

d. Sisa perkara yang dimohonkan Banding **63** perkara

### **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Sisa Perkara yang di Mohonkan Kasasi pada tahun 2020 sebanyak : **90** Perkara, dan pada tahun 2021 telah diterima perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak **97** Perkara;

- a. Perkara yang dicabut : 0 Perkara
- b. Perkara yang di putus : **86** Perkara
- c. Sisa perkara : **98** Perkara

### **Keadaan Perkara Tingkat PK**

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2021 sejumlah **97** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **45** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **52** Perkara

## **B. Penyelesaian Perkara**

### **Jumlah Sisa Perkara yang diputus**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2021 terdapat **86** Perkara sisa, dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak **386** Perkara. Rincian dari jenis sisa perkara adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa Perkara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A</b>	<b>GUGATAN</b>	
1	Pertanahan	<b>22</b>
2	Kepegawaian	<b>5</b>
3	Perijinan	<b>6</b>
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/ Parpol	<b>15</b>
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-



NO	Jenis Perkara	Sisa Perkara
1	2	
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	11
17	Merek	27
18	Lain Lain	-
	JUMLAH	86

### Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Dari perkara-perkara yang telah diselesaikan selama tahun 2021 sebanyak **300** Perkara, Perkara yang Putus Kurang dari 3 (Tiga) Bulan sejumlah **121** Perkara, Perkara yang putus 3 (Tiga) sampai dengan 5 (Lima) bulan sejumlah **114** Perkara, dan Perkara putus 5 (Lima) sampai dengan 12 (Dua Belas) Bulan sejumlah **65** Perkara.

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2021		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN
1	23/P/FP/2020/PTUN.JKT	156/G/2020/PTUN.JKT	122/G/2020/PTUN.JKT
2	195/G/KI/2020/PTUN.JKT	157/G/2020/PTUN.JKT	125/G/2020/PTUN.JKT
3	228/G/2020/PTUN.JKT	160/G/2020/PTUN.JKT	130/G/2020/PTUN.JKT
4	237/G/2020/PTUN.JKT	161/G/TF/2020/PTUN.JKT	131/G/2020/PTUN.JKT
5	238/G/2020/PTUN.JKT	164/G/2020/PTUN.JKT	136/G/2020/PTUN.JKT
6	234/G/2020/PTUN.JKT	168/G/2020/PTUN.JKT	142/G/2020/PTUN.JKT
7	239/G/2020/PTUN.JKT	169/G/2020/PTUN.JKT	143/G/2020/PTUN.JKT
8	6/G/TF/2021/PTUN.JKT	172/G/2020/PTUN.JKT	144/G/2020/PTUN.JKT
9	14/G/2021/PTUN.JKT	178/G/2020/PTUN.JKT	145/G/2020/PTUN.JKT
10	17/G/2021/PTUN.JKT	187/G/2020/PTUN.JKT	149/G/2020/PTUN.JKT
11	24/G/2021/PTUN.JKT	182/G/2020/PTUN.JKT	151/G/2020/PTUN.JKT
12	27/G/2021/PTUN.JKT	184/G/TF/2020/PTUN.JKT	153/G/2020/PTUN.JKT
13	29/G/2021/PTUN.JKT	192/G/2020/PTUN.JKT	155/G/2020/PTUN.JKT
14	34/G/2021/PTUN.JKT	196/G/2020/PTUN.JKT	159/G/2020/PTUN.JKT
15	35/G/2021/PTUN.JKT	197/G/2020/PTUN.JKT	166/G/2020/PTUN.JKT
16	37/G/2021/PTUN.JKT	208/G/2020/PTUN.JKT	167/G/2020/PTUN.JKT
17	41/G/2021/PTUN.JKT	190/G/2020/PTUN.JKT	173/G/2020/PTUN.JKT
18	47/G/2021/PTUN.JKT	206/G/2020/PTUN.JKT	177/G/2020/PTUN.JKT
19	50/G/2021/PTUN.JKT	215/G/2020/PTUN.JKT	179/G/2020/PTUN.JKT

20	51/G/2021/PTUN.JKT	219/G/2020/PTUN.JKT	183/G/2020/PTUN.JKT
21	57/G/2021/PTUN.JKT	230/G/KI/2020/PTUN.JKT	193/G/2020/PTUN.JKT
22	58/G/2021/PTUN.JKT	212/G/2020/PTUN.JKT	203/G/TF/2020/PTUN.JKT
23	59/G/2021/PTUN.JKT	217/G/2020/PTUN.JKT	207/G/2020/PTUN.JKT
24	10/G/KI/2021/PTUN.JKT	220/G/2020/PTUN.JKT	213/G/TF/2020/PTUN.JKT
25	28/G/KI/2021/PTUN.JKT	224/G/2020/PTUN.JKT	218/G/2020/PTUN.JKT
26	31/G/2021/PTUN.JKT	227/G/2020/PTUN.JKT	200/G/2020/PTUN.JKT
27	53/G/2021/PTUN.JKT	233/G/KI/2020/PTUN.JKT	201/G/2020/PTUN.JKT
28	65/G/2021/PTUN.JKT	231/G/2020/PTUN.JKT	202/G/2020/PTUN.JKT
29	66/G/2021/PTUN.JKT	2/G/2021/PTUN.JKT	216/G/2020/PTUN.JKT
30	71/G/TF/2021/PTUN.JKT	63/G/2021/PTUN.JKT	221/G/2020/PTUN.JKT
31	72/G/TF/2021/PTUN.JKT	15/G/2021/PTUN.JKT	223/G/2020/PTUN.JKT
32	73/G/2021/PTUN.JKT	33/G/2021/PTUN.JKT	226/G/2020/PTUN.JKT
33	74/G/2021/PTUN.JKT	3/G/2021/PTUN.JKT	236/G/2020/PTUN.JKT
34	75/G/2021/PTUN.JKT	4/G/2021/PTUN.JKT	204/G/2020/PTUN.JKT
35	92/G/2021/PTUN.JKT	7/G/2021/PTUN.JKT	222/G/2020/PTUN.JKT
36	97/G/2021/PTUN.JKT	13/G/2021/PTUN.JKT	232/G/2020/PTUN.JKT
37	98/G/2021/PTUN.JKT	18/G/2021/PTUN.JKT	235/G/2020/PTUN.JKT
38	99/G/2021/PTUN.JKT	21/G/2021/PTUN.JKT	9/G/2021/PTUN.JKT
39	102/G/2021/PTUN.JKT	22/G/2021/PTUN.JKT	1/G/2021/PTUN.JKT
40	23/G/KI/2021/PTUN.JKT	25/G/2021/PTUN.JKT	5/G/2021/PTUN.JKT
41	67/G/2021/PTUN.JKT	32/G/2021/PTUN.JKT	8/G/2021/PTUN.JKT
42	115/G/2021/PTUN.JKT	39/G/2021/PTUN.JKT	16/G/2021/PTUN.JKT
43	118/G/2021/PTUN.JKT	48/G/2021/PTUN.JKT	12/G/2021/PTUN.JKT
44	121/G/2021/PTUN.JKT	11/G/2021/PTUN.JKT	19/G/2021/PTUN.JKT
45	122/G/TF/2021/PTUN.JKT	30/G/TF/2021/PTUN.JKT	20/G/2021/PTUN.JKT
46	60/G/KI/2021/PTUN.JKT	36/G/2021/PTUN.JKT	40/G/2021/PTUN.JKT
47	107/G/2021/PTUN.JKT	38/G/2021/PTUN.JKT	26/G/2021/PTUN.JKT
48	113/G/2021/PTUN.JKT	46/G/2021/PTUN.JKT	55/G/2021/PTUN.JKT
49	128/G/2021/PTUN.JKT	77/G/2021/PTUN.JKT	56/G/2021/PTUN.JKT
50	1/P/FP/2021/PTUN.JKT	81/G/2021/PTUN.JKT	61/G/2021/PTUN.JKT
51	2/P/FP/2021/PTUN.JKT	42/G/2021/PTUN.JKT	62/G/2021/PTUN.JKT
52	3/P/FP/2021/PTUN.JKT	43/G/2021/PTUN.JKT	68/G/2021/PTUN.JKT
53	4/P/FP/2021/PTUN.JKT	44/G/2021/PTUN.JKT	52/G/2021/PTUN.JKT
54	5/P/FP/2021/PTUN.JKT	45/G/2021/PTUN.JKT	79/G/2021/PTUN.JKT
55	6/P/FP/2021/PTUN.JKT	49/G/2021/PTUN.JKT	83/G/2021/PTUN.JKT
56	7/P/FP/2021/PTUN.JKT	54/G/2021/PTUN.JKT	86/G/2021/PTUN.JKT
57	151/G/2021/PTUN.JKT	69/G/2021/PTUN.JKT	87/G/2021/PTUN.JKT
58	152/G/2021/PTUN.JKT	76/G/2021/PTUN.JKT	100/G/2021/PTUN.JKT
59	153/G/2021/PTUN.JKT	84/G/2021/PTUN.JKT	64/G/2021/PTUN.JKT
60	158/G/TF/2021/PTUN.JKT	85/G/2021/PTUN.JKT	104/G/2021/PTUN.JKT
61	78/G/KI/2021/PTUN.JKT	88/G/2021/PTUN.JKT	111/G/2021/PTUN.JKT
62	125/G/2021/PTUN.JKT	93/G/2021/PTUN.JKT	120/G/2021/PTUN.JKT

63	138/G/2021/PTUN.JKT	95/G/2021/PTUN.JKT	133/G/2021/PTUN.JKT
64	148/G/2021/PTUN.JKT	101/G/2021/PTUN.JKT	144/G/TF/2021/PTUN.JKT
65	140/G/2021/PTUN.JKT	108/G/2021/PTUN.JKT	154/G/2021/PTUN.JKT
66	147/G/2021/PTUN.JKT	109/G/2021/PTUN.JKT	
67	161/G/2021/PTUN.JKT	110/G/2021/PTUN.JKT	
68	166/G/2021/PTUN.JKT	123/G/2021/PTUN.JKT	
69	163/G/2021/PTUN.JKT	70/G/2021/PTUN.JKT	
70	170/G/2021/PTUN.JKT	82/G/2021/PTUN.JKT	
71	171/G/2021/PTUN.JKT	89/G/2021/PTUN.JKT	
72	175/G/2021/PTUN.JKT	90/G/2021/PTUN.JKT	
73	176/G/2021/PTUN.JKT	91/G/2021/PTUN.JKT	
74	177/G/2021/PTUN.JKT	94/G/2021/PTUN.JKT	
75	179/G/2021/PTUN.JKT	96/G/2021/PTUN.JKT	
76	181/G/2021/PTUN.JKT	103/G/2021/PTUN.JKT	
77	183/G/2021/PTUN.JKT	106/G/2021/PTUN.JKT	
78	126/G/2021/PTUN.JKT	117/G/2021/PTUN.JKT	
79	129/G/2021/PTUN.JKT	119/G/2021/PTUN.JKT	
80	143/G/2021/PTUN.JKT	136/G/2021/PTUN.JKT	
81	160/G/2021/PTUN.JKT	105/G/TF/2021/PTUN.JKT	
82	162/G/2021/PTUN.JKT	112/G/2021/PTUN.JKT	
83	170/G/2021/PTUN.JKT	114/G/2021/PTUN.JKT	
84	165/G/2021/PTUN.JKT	116/G/2021/PTUN.JKT	
85	173/G/2021/PTUN.JKT	127/G/2021/PTUN.JKT	
86	185/G/TF/2021/PTUN.JKT	131/G/2021/PTUN.JKT	
87	191/G/2021/PTUN.JKT	132/G/2021/PTUN.JKT	
88	197/G/2021/PTUN.JKT	137/G/2021/PTUN.JKT	
89	199/G/2021/PTUN.JKT	155/G/2021/PTUN.JKT	
90	202/G/2021/PTUN.JKT	164/G/2021/PTUN.JKT	
91	8/P/FP/2021/PTUN.JKT	189/G/2021/PTUN.JKT	
92	208/G/2021/PTUN.JKT	130/G/2021/PTUN/JKT	
93	209/G/2021/PTUN.JKT	134/G/2021/PTUN.JKT	
94	211/G/2021/PTUN.JKT	135/G/2021/PTUN.JKT	
95	213/G/2021/PTUN.JKT	149/G/TF/2021/PTUN.JKT	
96	9/P/FP/2021/PTUN.JKT	150/G/2021/PTUN/JKT	
97	219/G/2021/PTUN.JKT	162/G/2021/PTUN.JKT	
98	222/G/2021/PTUN.JKT	142/G/2021/PTUN.JKT	
99	10/P/FP/2021/PTUN.JKT	156/G/2021/PTUN.JKT	
100	235/G/2021/PTUN.JKT	157/G/2021/PTUN.JKT	
101	238/G/2021/PTUN.JKT	159/G/2021/PTUN.JKT	
102	234/G/2021/PTUN.JKT	167/G/2021/PTUN.JKT	
103	237/G/2021/PTUN.JKT	168/G/2021/PTUN.JKT	
104	241/G/2021/PTUN.JKT	169/G/TF/2021/PTUN.JKT	
105	250/G/2021/PTUN.JKT	172/G/2021/PTUN.JKT	

106	11/P/FP/2021/PTUN.JKT	182/G/TF/2021/PTUN.JKT	
107	247/G/2021/PTUN.JKT	192/G/2021/PTUN.JKT	
108	255/G/2021/PTUN.JKT	204/G/2021/PTUN.JKT	
109	263/G/2021/PTUN.JKT	192/G/2021/PTUN.JKT	
110	264/G/2021/PTUN.JKT	193/G/2021/PTUN.JKT	
111	217/G/2021/PTUN.JKT	196/G/2021/PTUN.JKT	
112	244/G/2021/PTUN.JKT	206/G/2021/PTUN.JKT	
113	236/G/2021/PTUN.JKT	186/G/2021/PTUN.JKT	
114	252/G/2021/PTUN.JKT	188/G/2021/PTUN.JKT	
115	260/G/2021/PTUN.JKT		
116	268/G/2021/PTUN.JKT		
117	269/G/2021/PTUN.JKT		
118	270/G/2021/PTUN.JKT		
119	271/G/2021/PTUN.JKT		
120	282/G/2021/PTUN.JKT		
121	283/G/2021/PTUN.JKT		
	121	114	65
<b>Jumlah</b>		<b>300 Perkara</b>	

**Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021**

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Putusan						Sisa Perkara	Permohonan			
		Masuk	Dicabut	Jumlah	Gugur	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Dikabulkan	Jumlah		Banding	Kasasi	Peninjauan	Esekusi
2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>GUGATAN</b>															
Pertanahan	21	52	-	73	-	8	11	22	7	51	22	34	27	19	2
Kepegawaian	11	26	-	37	-	4	9	13	4	32	5	19	11	3	3
Perijinan	9	13	-	22	-	-	1	7	8	16	6	9	9	4	1
Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	-	3	-	3	-	-	-	3	-	1	1	-	-
Badan Hukum/ Parpol	10	44	-	54	-	4	10	14	11	39	15	24	20	3	2
Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sengketa Informasi Publik/KIP	2	5	-	7	-	-	2	3	2	6	-	-	1	1	2
Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiktif Positif	1	11	-	12	-	2	-	10	-	11	-	-	-	-	-
Penyalahgunaan Wewenang	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tindakan Administrasi Pemerintahan	1	29	-	30	-	7	4	5	2	19	11	2	-	-	-
Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain Lain	16	131	-	147	-	40	20	30	12	120	27	36	28	15	2
<b>JUMLAH</b>	<b>72</b>	<b>314</b>	<b>-</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>104</b>	<b>46</b>	<b>300</b>	<b>86</b>	<b>125</b>	<b>97</b>	<b>45</b>	<b>14</b>

## Keterangan

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah Perkara Putus Tahun 2021 sejumlah **300** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Banding sebanyak **125** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Banding sebanyak **175** Perkara

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah Perkara banding di Tahun 2021 sejumlah **125** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Kasasi sebanyak **97** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi sebanyak **28** Perkara

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2021 sejumlah **97** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **45** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **52** Perkara

## C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

### 1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Pengadaan Jasa Konsultan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum yang bersumber dari dana APBN DIPA TA 2021 Nomor SP DIPA-005.05.2.526733/2021 tanggal 23 November 2020 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Dalam Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp. 33.000.000, - yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## **2. Prodeo**

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.

Selama periode tahun 2021 jumlah perkara dengan biaya Cuma-Cuma / Prodeo sebanyak 6 perkara.

Anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.526733/2021 tanggal 23 November 2020 terdapat anggaran belanja biaya Perkara Prodeo untuk 1 (satu) perkara sebesar Rp. 1.250.000,-.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara mengalokasikan Anggaran Pembebasan biaya panjar perkara sebesar Rp. 7.500.000,-

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

### REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT, GOLONGAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

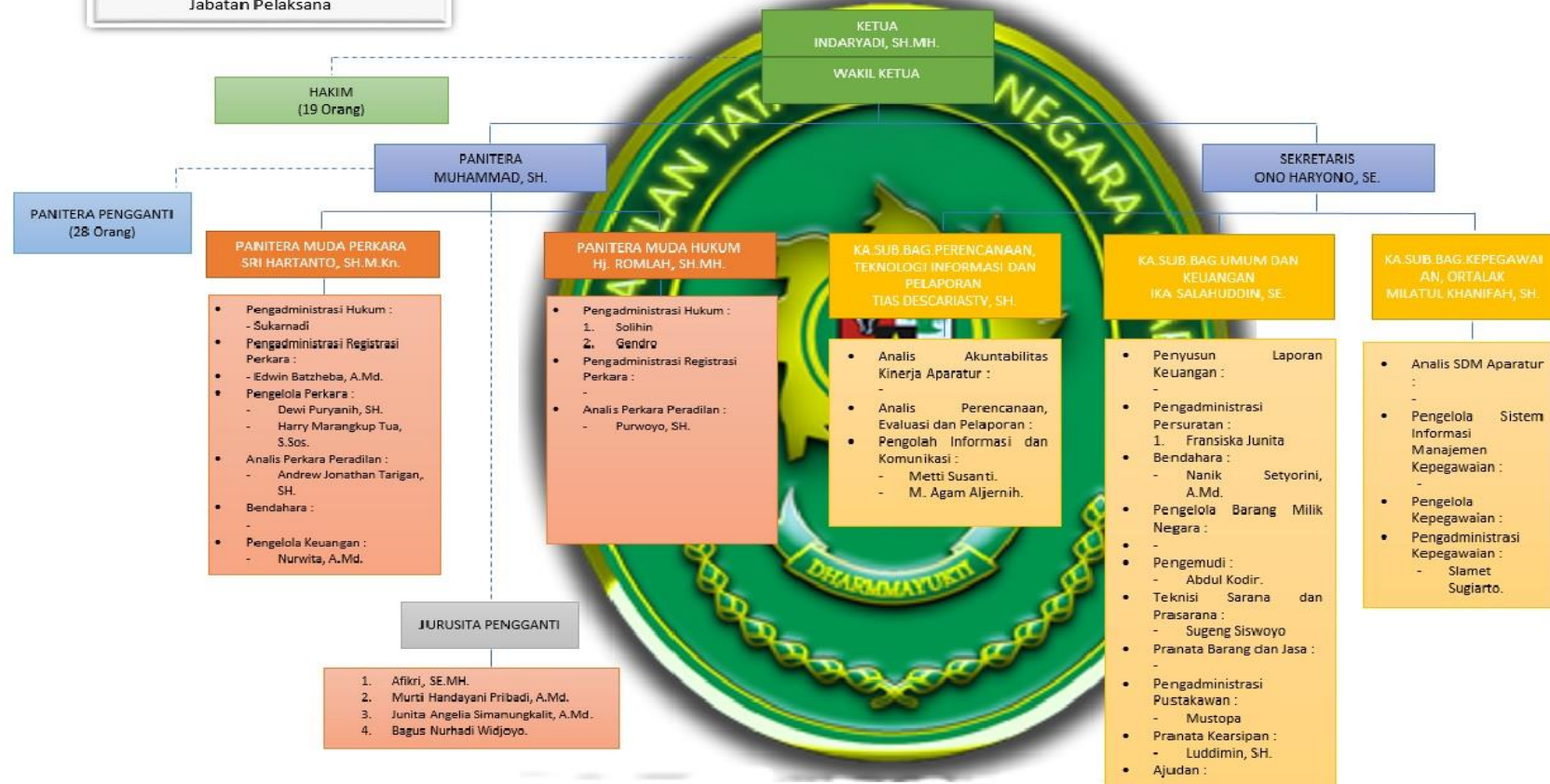
No	J A B A T A N	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				P E N D I D I K A N						KETERANGAN	
			LK	PR	e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	S.3	S.2	S.1	D.3	SLA	SMP		SD
I	<b>HAKIM</b>																												
	1. KETUA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. HAKIM	18	13	5	-	-	1	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	1	-	-	-	-	
	4. CALON HAKIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	<b>KEPANITERAAN</b>																												
	1. PANITERA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	2. PANITERA MUDA	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	3. PANITERA PENGGANTI	28	10	18	-	-	-	11	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	
	4. JURUSITA PENGGANTI	4	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
III	<b>KESEKRETARIATAN</b>																												
	1. SEKRETARIS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	2. KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	3. KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	4. KA. SUB BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	5. STAF	18	13	5	-	-	-	-	2	3	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	9	-	1	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1</b>



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 907/SEK/KP.01.2/6/2020.  
Tentang : Penetapan Nomenklatur  
Jabatan Pelaksana

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SESUAI JABATAN NOMENKLATUR PELAKSANA



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember 2021 adalah 76 orang yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang laki-laki dan 33 (tiga puluh tiga) orang perempuan.

#### A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

##### a. Hakim

Jumlah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 20 orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	Indaryadi, S.H., M.H Nip. 196902251991031004	Pembina Utama Muda ( IV/c )	Ketua
2.	Sutiyono, S.H., M.H Nip. 196801201997031001	Pembina Tk. I ( IV/b )	Hakim
3.	Danan Priambada, S.H., M.H Nip. 197406072000121001	Pembina Tk. I ( IV/b )	Hakim
4.	I Dewa Gede Puja, S.H., M.H Nip. 197703312001121001	Pembina ( IV/a )	Hakim
5.	Muhammad Ilham, S.H., M.H Nip. 19760925 200112 1 003	Pembina ( IV/a )	Hakim
6.	Bambang Soebiyantoro, S.H., M.H Nip. 197711022001121002	Pembina ( IV/a )	Hakim
7.	Indah Mayasari, S.H., M.H Nip. 197904132002122004	Pembina ( IV/a )	Hakim
8.	Pengki Nurpanji, S.H., M.H Nip. 197806192002121003	Pembina ( IV/a )	Hakim
9.	Mohamad Syauqie, S.H., M.H Nip. 197911292002121002	Pembina ( IV/a )	Hakim
10.	Merna Cinthia, S.H., M.H Nip. 197810292001122001	Pembina ( IV/a )	Hakim
11.	Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H Nip. 198007312002121003	Pembina ( IV/a )	Hakim

12.	Budiamin Rodding, S.H., M.H Nip. 197905032003121001	Pembina ( IV/a )	Hakim
13.	Elfiany, S.H., M.Kn Nip. 197710072003122001	Pembina ( IV/a )	Hakim
14.	Dr. Nasrifal, S.H., M.H Nip. 19760727 200312 1 001	Pembina ( IV/a )	Hakim
15.	Sudarsono, S.H., M.H Nip. 197605032006041004	Pembina ( IV/a )	Hakim
16.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si, S.H., M.H Nip. 198011042006042004	Penata Tk. I ( III/d )	Hakim
17.	Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H Nip. 19810127 200604 1 003	Penata Tk. I ( III/d )	Hakim
18.	Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H Nip. 198106122006042003	Penata Tk. I ( III/d )	Hakim
19.	Akhdiat Sastrodinata, S.H., M.H Nip. 198105182007041001	Penata Tk. I ( III/d )	Hakim
20.	Sahibur Rasid, S.H., M.H Nip. 197907152008051002	Penata Tk. I ( III/d )	Hakim

#### b. Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 31 orang termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	Muhammad, SH Nip. 19690520 199203 1 004	Pembina Tk. I ( IV/b )	Panitera
2.	Sri Hartanto, SH, M.Kn Nip. 19700411 199103 1 003	Pembina ( IV/a )	Panitera Muda Perkara
3.	Hj. Romlah, SH, MH Nip. 19680828 199303 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Muda Hukum
4.	Hj. Sri Suhartiningsih, SH, MH Nip. 19691119 198903 2 001	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
5.	Diah Kumala Dewi, SH, MH Nip. 19690616 199303 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti

6.	Jumarta, SH, MH Nip. 19660324 199603 1 001	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
7.	Titin Rustinih, SH, MH Nip. 19710101 199603 2 004	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
8.	Heri Susanto, SH, MH Nip. 19680924 200212 1 005	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
9.	Sri Ambarwati, SH, MH Nip. 19730121 199703 2 001	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
10.	Mulyati, SH, MH Nip. 19740209 199903 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
11.	Yulianti, SH, MH Nip. 19760718 199903 2 004	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
12.	M. Iqbal Aroza, SH Nip. 19780610 200003 1 003	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
13.	Maria Maghdalena Hutapea, SH, MH Nip. 19690815 199603 2 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
14.	Tri Bhakti Adi, SH, MH Nip. 19750824 199803 1 002	Pembina ( IV/a )	Panitera Pengganti
15.	Dra. Eni Nuraeni Nip. 19640120 199103 2 005	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
16.	Ninik Sulistyaningsih, SH Nip. 19621007 199203 2 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
17.	Agus Widada, SH Nip. 19650824 199303 1 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
18.	Yusuf Amin, SH Nip. 19670127 199103 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
19.	Indun Nawang Wulandari, SH Nip. 19701106 199503 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
20.	Almercy, SH Nip. 19670901 199803 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
21.	Rudi Syamsumin, SH Nip. 19751207 199903 1 005	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
22.	Anitha Syahrini, SH Nip. 19740402 200003 2 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti

23.	Sri Mukaromah, SH Nip. 19650529 199103 2 003	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
24.	Sriwidati, SH Nip. 19750721 200012 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
25.	Risma Hutajulu, SH Nip. 19681006 199103 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
26.	Suprapti, SH, MH Nip. 19731028 200112 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
27.	Dewi Aqua Kusumasari, SH, MH Nip. 19840204 200904 2 011	Penata Tk. I ( III/d )	Panitera Pengganti
28.	Sumaja, SH Nip. 19670816 199303 1 006	Penata ( III/c )	Panitera Pengganti
29.	Lia Utami Nawangsih, SE, MH Nip. 19860402 200912 2 002	Penata ( III/c )	Panitera Pengganti
30.	M. Salomo F. Simandjuntak, ST, SH Nip. 19750222 200912 1 002	Penata ( III/c )	Panitera Pengganti
31.	Kornelius, SE, SH Nip. 19800719 200912 1 003	Penata ( III/c )	Panitera Pengganti

### c. Jurusita Pengganti

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 4 orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	Afikri, SE, MH Nip. 19740708 200604 1 003	Penata Tk. I ( III/d )	Jurusita Pengganti
2.	Murti Handayani Pribadi, A.Md Nip. 19680929 199503 2 002	Penata ( III/c )	Jurusita Pengganti
3.	Junita Angelia Simanungkalit, A.Md Nip. 19850627 200904 2 006	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Jurusita Pengganti
4.	Bagus Nurhadi Widjoyo Nip. 19871104 200604 1 001	Pengatur Tk. I ( II/d )	Jurusita Pengganti

## A.2. Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial / Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 13 orang termasuk Pejabat Struktural dan stafnya sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	Ono Haryono, SE Nip. 19690310 199103 1 003	Pembina Tk. I ( IV/b )	Sekretaris
2.	Milatul Khanifah, SH Nip. 19730515 199203 2 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
3.	Ika Salahudin, SE Nip. 19720411 200604 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan
4.	Tias Descariasty, SH Nip.19841209 200604 2 002	Penata Tk. I ( III/d )	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	Slamet Sugiarto Nip. 19690609 199103 1 003	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Staf Sub. Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
6.	Luddimin, SH Nip. 19720429 199303 1 003	Penata Tk. I ( III/d )	Pranata Kearsipan
7.	Nanik Setyorini, A.Md Nip. 19740321 199703 2 001	Penata ( III/c )	Bendahara Pengeluaran
8.	Franziska Junita Harjiman Nip. 19700618 199103 2 002	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Pengadministrasian Persuratan
9.	Mustopa Nip. 19700314 200604 1 001	Pengatur Tk. I ( II/d )	Pengadministrasian Pustakawan
10.	Sugeng Siswoyo Nip. 19680122 200604 1 001	Pengatur ( II/c )	Teknisi Sarana dan Prasarana
11.	Metti Susanti Nip. 19750617 200212 2 002	Penata Muda ( III/a )	Pengolah Informasi dan Komunikasi
12.	Muhammad Agam Aljernih Nip. 19841019 200604 1 002	Pengatur Tk. I ( II/d )	Pengolah Informasi dan Komunikasi

Jumlah Staf di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	Harry Marangkup Tua, S.Sos Nip. 19811222 200604 1 005	Penata Tk. I ( III/d )	Pengelola Perkara
2.	Nurwita, A.Md Nip. 19761030 200003 2 001	Penata ( III/c )	Pengelola Keuangan
3.	Dewi Puryanih, SH Nip. 19640414 199103 2 005	Penata ( III/c )	Pengelola Keuangan
4.	Gendro Wisnu Broto Nip. 19650525 199103 1 007	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Pengadministrasi Hukum
5.	Purwoyo, SH Nip. 19800714 200604 1 013	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Analisis Perkara Pengadilan
6.	Andrew Jonathan Tarigan, SH Nip. 19871202 201903 1 003	Penata Muda ( III/a )	Analisis Perkara Pengadilan
7.	Sukarnadi Nip. 19650422 200604 1 001	Pengatur ( II/c )	Pengadministrasi Hukum
8.	Solihin Nip. 19800908 200604 1 016	Pengatur ( II/c )	Pengadministrasi Hukum
9.	Edwin Bathzeba, A.Md Nip. 198802112020121005	Pengatur ( II/c )	Pengadministrasi Register Perkara

Jumlah tenaga kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN ) sebanyak 11 orang , sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Keterangan
1.	Della Wahyudin	Satpam
2.	Asep Saepudin	Satpam
3.	Heru Setiawan, A.Md	Satpam
4.	M. Rizky Putrasyah	Pramubakti
5.	Mamat Nurahmat	Pramubakti

6.	Hasyim, SH	Pramubakti
7.	M. Rizal Muslim, A.Md	Pramubakti
8.	Jana amelia L Tobing	Pramubakti
9.	Devika Rahmanda	Pramubakti
10.	Bagus Nur Ronggo Pameling	Satpam
11.	Rangga Nur Hidayat	Satpam

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa berkerjasama, berintegritas tinggi, beriwibawa, kuat, cakap, berkualitas, professional, berdaya huna dan sadar akan tanggung jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat sera sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Mutasi**

HAKIM

**Masuk :**

1. MUHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H., Hakim Yustisial pasa Bawas MARI menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11 Januari 2021.
2. SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 11 Januari 2021.
3. INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 09 Agustus 2021.
4. PENGKI NURPANJI, S.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 09 Agustus 2021.



5. SAHIBUR RASID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 18 Agustus 2021.
6. Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 25 Agustus 2021.
7. Dr. NOVI DEWI CAHYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T. 13 September 2021.
8. ETININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 01 September 2021

**Keluar :**

1. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang T.M.T 02 Agustus 2021.
2. IRHAMTO, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan T.M.T. 08 Agustus 2021.
3. Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang T.M.T. 24 Agustus 2021.
4. DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram T.M.T. 25 Agustus 2021.
5. Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin T.M.T. 25 Agustus 2021.
6. Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Asisten Hakim Agung T.M.T. 01 September 2021.

7. SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan T.M.T. 03 September 2021.
8. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar T.M.T 03 September 2021.
9. SUTİYONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo T.M.T 20 Desember 2021.

## **B. Promosi**

### **Panitera Penggati :**

- KORNELIUS, S.E., S.H., Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta T.M.T 19 Nopember 2021.

### **PEGAWAI NEGERI SIPIL:**

- EDWIN BATHZEBA, A.Md., Calon Pegawai pada PTUN T.M.T 1 Februari 2021.

### **PENSIUN :**

- Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan TUN Jakarta pensiun Per 1 Mei 2021

## **DIKLAT**

### **Diklat ( SM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat )**

1. Untuk mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan TUN Angkatan XII, berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 35/Bld/S/01/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal :

- Tahap I (Belajar Metode Online Mandiri) : 25 Januari 2021 s.d. 5 Februari 2021.
- Tahap II (Belajar Metode Online Class) : 8 Februari 2021 s.d. 24 Februari 2021.
- Tahap III (Bedah Kasus Metode Online Class : 26 Februari 2021 s.d. 5 Maret 2021.

Yang diikuti oleh:

TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

2. Mengikuti FGD Proposal Penelitian dengan judul “Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Pemeriksaan Hak Uji Materiil”, berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 148/Bld/S/2/2021, tanggal 9 Februari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021, yang diikuti oleh:

AKHDIAT SASTRODINATA, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

3. Menjadi Peserta FGD Proposal Penelitian dengan judul “Kajian Terhadap Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung”, berdasarkan surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 15/Bld/S/2/2021, tanggal 09 Februari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021, yang diikuti oleh:

- NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Menjadi Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 86/Bld.3/Dik/S/2/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal:

- Tahap I : 01 s.d. 05 Maret 2021.
- Tahap II : 15 s.d. 23 Maret 2021.

Yang diikuti oleh:

- SUTIYONO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta
5. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia secara online class, berdasarkan surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 86/Bld.3/Dik/S/2/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang dilaksanakan Tahap I tanggal 1 s.d 5 Maret 2021, Tahap II : tanggal 15 s.d 23 Maret 2021 yang diikuti oleh:
- SUTIYONO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Mengikuti Bimbingan Teknis Persidangan secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 243/Djmt.3/B/2/2021, tanggal 18 Februari 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2021 yang diikuti oleh:
- DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
7. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021, berdasarkan surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 404/Djmt.3/B/3/2021, tanggal 12 Maret 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2021, yang diikuti oleh:
- MOHAMAD SYAUQIE, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. NASRIFAL, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
8. Mengikuti kegiatan Pelatihan Singkat Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan terkait Kapita Selekt Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 352/Bld/S/03/2021, tanggal 12 Maret 2021, yang dilaksanakan

Tahap I pada tanggal 17 Maret 2021 s.d. 19 Maret 2021, Tahap II tanggal 22 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021, yang diikuti oleh:

- ELFIANY, S.H.M.Kn., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
9. Mengikuti kegiatan Penyusunan/Review Kurikulum dan Silabus Pelatihan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 364/Bld/S/3/2021, tanggal 17 Maret 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 Maret 2021, yang diikuti oleh:
- NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SUTIYONO, S.H.,M,H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - Dr. NASRIFAL, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta
  - Dr. UMAR DANI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - SUDARSONO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn., Panitera Muda Perkara Pengadilan TUN Jakarta.
10. Bimbingan Teknis Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN/443/KP.01/IV/2021, tanggal 05 April 2021, yang dilaksanakan pada pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 02021 yang diikuti oleh:
- IRHAMTO, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - SRI HARTANTO, S.H., M.Kn., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
11. Seminar Daring / Webinar dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Pajak ke-19, berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Pajak, Nomor

- : UND-39/PP/2021, tanggal 5 April 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 yang diikuti oleh:
- MERNA CINTHIA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
12. Mengikuti Rapat Koordinasi Program Prioritas Nasional, berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1010/SEK/HM.02.3/4/2021, tanggal 23 April 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 April 2021, yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
13. Mengikuti Rapat Evaluasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Nomor : 32/TuakaBin/IV/2021, tanggal 20 April 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021, yang diikuti oleh:
14. Mengikuti Rapat FGD Proposal Penelitian yang berjudul “Analisis Dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum Atas Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya Di Dalam Isu Hukum Fiktif Positif,
- berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 672/BLD/S/4/2021, tanggal 30 April 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 yang diikuti oleh:
- NELVY CHRISTIN, SH., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SUTIYONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
15. Mengikuti FGD Online Hasil Penelitian dengan judul “Kajian terhadap Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung”, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 707/Bld/S/5/2021, tanggal 10 Mei 2021, yang dilaksanakan pada 20 Mei 2021, yang diikuti oleh:
- NELVY CHRISTIN, SH., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

16. Mengikuti FGD Penyusunan Perubahan Kebijakan Mahkamah Agung terkait E-Court Upaya Hukum Banding, berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1120/SEK/HM.02.3/5/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2021 yang diikuti oleh:
  - SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
17. Mengikuti FGD Online Hasil Penelitian dengan judul “Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Hak Uji Materiil”, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 724/Bld/S/5/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 yang diikuti oleh:
  - Dr. NASRIFL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
18. Mengikuti Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Penelitian dan Persiapan FGD Akhir “Kajian Terhadap Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat dari Plt. Kepala Puslitbang Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 190/Bld.2/Lit/ST/5/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2021 yang diikuti oleh:

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
19. Mengikuti Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor : 746/Djmt/B/5/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021, yang diikuti oleh:
  - IRHAMTO, S.H., Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - DANAN PRIAMBADA, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - SUTIYONO, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- I DEWA GEDE PUJA, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - MUHAMMAD ILHAM, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - MERNA CINTHIA, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - INDAH MAYASARI, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - MOHAMAD SYAUQIE, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta
  - Dr. NASRIFAL, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - ELFIANY, SH.M.Kn., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - BUDIAMIN RODDING, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. UMAR DANI, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - SYAFAAT, SH.MH.MM., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - SUDARSONO, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - TAUFIK PERDANA, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - ENRICO SIMANJUNTAK, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - AKHDIAT SASTRODINATA, SH.MH., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - MUHAMMAD, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - ONO HARYONO, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - Hj. ROMLAH, SH.MH., Panmud Hukum Pengadilan TUN Jakarta.
  - SRI HARTANTO, SH.M.Kn., Panmud Perkara Pengadilan TUN Jakarta.
20. Menghadiri Undangan FGD Proposal Tim Penelitian “Kajian Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 793/BLD/S/5/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan 1 Juni 2021, yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
21. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik dan Keputusan Elektronik bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/Bld/S/5/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang dilaksanakan Tahap



I pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021, Tahap II tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021, yang diikuti oleh:

- ELFIANY, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

22. Menghadiri Undangan Konsinyering Hasil Penelitian yang berjudul “Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum Atas Pengaruh UU Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif Positif”, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 903/Bld/S/6/2021, tanggal 08 Juni 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 12 Juni 2021, yang diikuti oleh:

- BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

23. Menghadiri Undangan FGD Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2018, berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1333/SEK/HM.01.1/6/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 yang diikuti oleh:

- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

24. Mengikuti pelatihan teknis yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat dari A.n. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Nomor : 766/Bld.3/S/7/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang dilaksanakan pada:

1. Tahap I ( Belajar Metode Online Mandiri)

Tanggal : 26 Juli 2021 s.d. 29 Juli 2021.

2. Tahap II (Belajar Metode Online Class)

Tanggal : 02 Agustus 2021 s.d. 06 Agustus 2021.

yang diikuti oleh :

- AFIKRI, S.E., M.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan TUN Jakarta

- JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md, Juru Sita Pengganti Pengadilan TUN Jakarta
25. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, berdasarkan surat dari A.n. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Nomor : 821/Bld.3/Dik/S/8/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang dilaksanakan pada:
- Tahap I ( Belajar Metode Online Mandiri)  
Tanggal : 16 Agustus 2021 s.d. 20 Agustus 2021.
  - Tahap II (Belajar Metode Online Class)  
Tanggal : 23 Agustus 2021 s.d. 30 Agustus 2021, yang diikuti oleh :
    - MUHAMMAD, S.H., M.H., Panitera Pengadilan TUN Jakarta.
    - MULYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan TUN Jakarta.
    - LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
26. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 1405/Bld/S/8/2021, tanggal 13 Agustus 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021, yang diikuti oleh :
- ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
27. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor : 1154/Djmt.3/B/8/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 10 September 2021, yang diikuti oleh:
- INDAH MAYASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta
  - BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta

28. Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik pada Tingkat Judex Factie, berdasarkan surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 99/S.Und/Bua.6/HK.00/IX/2021, tanggal 3 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 10 September 2021, yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
29. Menghadiri Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan Tahun 2021 secara online, berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1132/Bld.3/Dik/S/9/2021, tanggal 10 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021, yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - ENRICO SIMANDJUNTAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
30. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tata Usaha Negara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1586/Bld/S/9/2021, tanggal 08 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal :
- Tahap I (Belajar Metode Online Mandiri) : 20 September s.d. 24 September 2021.
- Tahap II (Belajar Metode Online Class) : 27 September s.d. 04 Oktober 2021.
- Yang diikuti oleh:
1. ELFIANY, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  2. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
31. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Rancangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Administrasi dan Persidangan secara Elektronik, berdasarkan surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

- RI, Nomor: 102/S.Und/Bua.6/HK.00/IX/2021, tanggal 13 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 September 2021 yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
32. Menghadiri undangan Rekonsiliasi Data PPNPN APBN Semester 2, berdasarkan surat dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Nomor: 950/IV-03/0921, tanggal 08 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 15 september 2021, yang diikuti oleh:
- MUHAMMAD AGAM ALJERNIH, Pengolah Informasi dan Komunikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
33. Mengikuti Persiapan Penyusunan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 223/Bua.1/OT.01.1/9/2021 Tanggal 13 September 2021, melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021, yang diikuti oleh:
- ONO HARYONO, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - METTI SUSANTI, Pengolah Informasi dan Komunikasi Sub.Bag. Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
34. Mengikuti Persiapan Penyusunan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 223/Bua.1/OT.01.1/9/2021 Tanggal 13 September 2021, Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021, yang diikuti oleh:
- ONO HARYONO, SE., Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - METTI SUSANTI, Pengolah Informasi dan Komunikasi Sub.Bag. Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
35. Menjadi Tim Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Posbakum dan Prodeo Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor : 150/DjMT/Kep/9/2021,

tanggal 14 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
- MUHAMMAD, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

36. Menghadiri Undangan Tim FGD Hasil Penelitian dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, dengan judul “Perluasan Kewenangan Peratun Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (OOD)”, berdasarkan surat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 567/Bld.2/Lit/S/IX/2021, tanggal 28 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 30 september 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

37. Mengikuti kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Buku II di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor: 151/Djmt/Kep/9/2021, tanggal 14 September 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- SUTIYONI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
- MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

38. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Barang/Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor : 1538/Djmt.3/B/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M H., Hakim PTUN Jakarta.
39. Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Panitera / Panitera Pengganti TK.I Gelombang 2 (Dua) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, berdasarkan surat dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1322/Bld.3/Dik/S/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal:
- Tahap I (Belajar Metode Online Mandiri) : 18 – 22 Oktober 2021  
Tahap II (Belajar Metode Online Class) : 25 – 29 Oktober 2021
- Yang diikuti oleh;
- M. IQBAL AROZA, S.H., M.H., Panitera Pengganti PTUN Jakarta.
  - DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
40. Mengikuti Pembinaan Teknis Secara Virtual, berdasarkan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, Nomor: 65/WKMA.NY/UND/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Aplikasi Zoom yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021, yang diikuti oleh:
- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - DANA PRIYAMBADA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SUTIYONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - Dr. NASRIFAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - ELFIANY, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
  - FENGKI NURPANDI, S.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MERNA CINTHIA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - INDAH MAYASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - SAHIBUR RASID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
  - Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta
  - AKHDIAT SATRODINATA, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
  - ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
  - MUHAMMAD, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - ONO HARYONO, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan TUN Jakarta.
41. Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : W2.TUN/1175/KP.00.4/X/2021, Tanggal 19 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2021, yang diikuti oleh:
- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MUHAMMAD, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - MILATUL KHANIFAH, S.H., M.H., Ka. Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
42. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Barang/Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 1538/Djmt.3/B/10/2021, Tanggal 12 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, yang diikuti oleh:
1. MUHAMMAD SYAUQIE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  2. AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., Hakim TUN Negara Jakarta.
43. Mengikuti Kegiatan Diskusi Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Angka IV Tahun 2021, berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 3549/-1.862.31, Tanggal 18 Oktober

2021, Via Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

44. Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 1598/DjMT.3/B/10/2021, Tanggal 22 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, yang diikuti oleh:

- SRI HARTANTO, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- TIAS DESCARIASTY, S.H., Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- BAGUS NURHADI WIDJOYO, Jusurita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

45. Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV, berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 1434/Bld.3/Dik/S/010/2021, Tanggal 26 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada :

Tahap I (Belajar Metode Online Mandiri) : 01 Nov s.d. 11 Nov 2021.

Tahap II (Belajar Metode Classical) : 15 Nov s.d. 24 Nov 2021.

Tahap III (Belajar Kasus Metode Classical) : 25 Nov s.d. 01 Desember 2021.

Yang diikuti oleh:

- PENGKI NURPANJI, S.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

46. Mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil penelitian yang berjudul “Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung”, berdasarkan surat dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Nomor : 668/Bld.2/Lit/S/10/2021.

Tanggal 26 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 yang diikuti oleh:

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.



47. Mengikuti Training of Trainers (TOT) Reguler, berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1463/Bld.3/Dik/S/10/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, yang dilaksanakan pada:
- Tahap 1 (Pembelajaran Mandiri Nonklasikal : Rabu s.d. Jum'at / 03 s.d. 05 November 2021.
- Tahap II ( Online Class) : Senin s.d. Jum'at / 08 s.d. 12 November 2021
- Yang diikuti oleh:
1. ELFYANI, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  2. JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
48. Mengikuti FGD Hasil Penelitian “Kajian Pembaruan Hukum Acara Di Peradilan Tata Usaha Negara”, berdasarkan surat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 699/Bld.2/Lit/S/XI/2021, tanggal 01 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021, yang diikuti oleh:
- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
49. Mengikuti FGD Hasil Penelitian “Kajian Pembaruan Hukum Acara Di Peradilan Tata Usaha Negara”, berdasarkan surat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 699/Bld.2/Lit/S/XI/2021, Tanggal 01 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 yang diikuti oleh:
- SUTIYONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - DANAN PRIYAMBADA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.
  - Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
  - Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.
50. Mengikuti Temu Wicara Virtual Gelombang I Hakim Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Indonesia Timur dan Tengah, berdasarkan surat dari Kepala Pudidlat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 1538/Bld.3/Dik/S/11/2021, tanggal 03 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2021 melalui zoom meeting, yang diikuti oleh:

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H., Hakim PTUN Jakarta.

51. Mengikuti Sosialisasi “Penerapan Aplikasi Turnitin (Pendeteksi Plagiarisme) dan Penyusunan Resume Hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021”, berdasarkan surat dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 2094/Bld/S/11/2021, tanggal 03 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 November 2021 yang diikuti oleh:

- SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Hakim PTUN Negara Jakarta.

52. mengikuti FGD Hasil Penelitian “Peningkatan Sangketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali Dan Peran Yurisprudensi”, berdasarkan surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Nomor : 712/Bld.2/Lit/S/XI/2021, tanggal 01 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021, yang diikuti oleh:

- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- INDAH MAYASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

53. Menghadiri “Launching Aplikasi, Peresmian PTSP, Data Center, Public Campaign, dan Peresmian Meja Informasi”, berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Nomor : 1808/Djmt.1/B/HM.00/XI, tanggal 22 November 2021, dan Surat Nomor : 1863/Djmt.1/B/HM.00/XI, tanggal 26 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 yang diikuti oleh :

- INDARYADI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- MILATUL KHANIFAH, S.H., Ka. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (mewakili Sekretaris).

54. Menghadiri rapat kelulusan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV, berdasarkan surat dari Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung RI, Nomor : 1792/Bld.3/Dik/S/011/2021, 30 November 2021, Aplikasi

Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021, yang diikuti oleh : SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan TUN Jakarta.

55. Mengikuti Pelatihan Online Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, berdasarkan surat dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1884b/Djmt.3/B/11/2021, tanggal 30 November 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 10, 17, 24 Desember 2021, melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh : LUDDIMIN, S.H., Pranata Kearsipan Pengadilan TUN Jakarta.
56. Menghadiri Undangan pembahasan hasil pemeriksaan BPK pada PTUN Jakarta, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Mahkamah Agung RI., berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Nomor : 02/PD TT\_BLI-MA/12/2021, tanggal 10 Desember 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021, yang diikuti oleh :
  - ONO HARYONO, SE. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
  - M. SALOMO F. SIMANJUNTAK, ST., SH Panitera Pengganti / Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
57. Mengikuti Bimbingan Teknis TIK di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat dari Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 1941a/DjMT.3/B/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, melalui Aplikasi Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Desember 2021, yang diikuti oleh:
  1. BAGUS NURHADI WIDJOYO, Jurusita Pengganti Pengadilan TUN Jakarta.
  2. MOHAMAD RIZAL MUSLIM, A.Md., PPNPN Pengadilan TUN Jakarta.
58. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan PNBPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021., berdasarkan Surat dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor

: W2-TUN/1441/PP.00.3/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, melalui aplikasi Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021, yang diikuti oleh:

- MUHAMMAD, SH., MH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- ONO HARYONO, SE. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- IKA SALAHUDDIN, SE. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- SRI MUKAROMAH, SH. Panitera Pengganti/ Bendahara Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- NURWITA, A.Md. Pengelola Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**BAB IV**  
**Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 11.287.791.000	Rp. 11.173.113.922	Rp. 114.677.078	

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 4.124.837.000	Rp. 4.024.407.196	Rp. 100.429.804	

Program Sarana dan Prasarana

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2021 Untuk PTUN Jakarta Mendapat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 18.694.909.000,- Dengan Perincian :

1. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Sebesar Rp. 18.632.009.000,-
2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Fasilitas Pendukung SIPP) sebesar Rp. 62.900.000,-

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (526732)	Rp. 62.900.000	Rp. 62.475.000	Rp. 425.000	

## PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2021 untuk PTUN JAKARTA mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 8.600.000

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA (526733)	Rp. 8.600.000	Rp. 6.410.000	Rp. 2.190.000	

### Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Sisa Awal	962.170.202	
2	Penerimaan Tahun ini	847.331.700	
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan		61.825.000
4	Biaya Panggilan		52.793.200
5	Biaya Pemberitahuan		64.851.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		36.664.000
7	Pengiriman Biaya Perkara		176.280.000
8	Materai		4.050.000
9	PNBP		
	a. Pendaftaran		30.980.000
	b. Redaksi		8.140.000
	c. Lainnya		34.617.000
	d. Sisa Panjar disetor		8.048.400
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara		187.270.200
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media		-
12	Pemberkasan dan Pengiriman		75.033.500
	Jumlah Pengeluaran		738.552.300
	<b>Saldo Akhir</b>		<b>1.070.949.602</b>






## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil	1	
3	Ruang Hakim	30	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	8	
7	Ruang Kepaniteraan	2	
8	Komputer	45	
9	Laptop	24	
10	Printer	37	
11	Scanner	5	
12	Infokus	1	
13	PABX	1	
14	AC	10	
15	Genset	1	





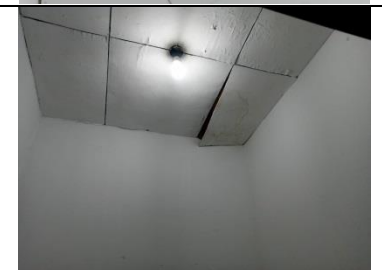

### Rumah Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	1993				
1.1	Ketua	1993			X	
1.2	Wakil	1993			X	
1.3	Hakim	1993		X		
1.4	Hakim	1993		X		
1.5	Hakim	1992			X	
1.6	Hakim	1992			X	

Berikut adalah foto keterangan keadaan rumah dinas :

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atap atap /plafon jebol,</li> <li>• Kusen yang sudah termakan rayap,</li> <li>• Dinding / tembok yang sudah mulai kusam.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

### Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta





No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Komponen penunjang lainnya rusak total</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

### Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Komponen penunjang lainnya rusak total</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

## Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Altis	2004	X			
2	Toyota Vios	2009	X			
3	Proton	2011	X			
4	Toyota Kijang Kapsul	2003		X		
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	honda supra x 125D	2007		X		
2	honda supra x 125D	2007		X		
3	TIGER GL 200R	2007			X	Dalam proses Penghapusan
4	Honda	2008		X		
5	Honda	2008		X		
6	Honda	2008		X		
7	Honda	2008		X		
8	Honda	2008		X		

KENDARAAN DINAS RODA 4				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Toyota Altis			2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyata Altis 1800 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1567 GQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Vios 1500 cc</li> <li>- Plat Nomor B 8560 WU</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Proton			4	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proton 1300 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1414 PQ</li> <li>- Merk Proton</li> <li>- Thn 2011</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Kijang Kapsul</li> <li>- Plat Nomor B 7684 JQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2003</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>

KENDARAAN DINAS RODA 2				
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Honda Tiger CW 200 cc			2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Tiger CW 200 cc</li> <li>- Plat Nomor B 6017 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6016 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
Honda Supra X 125 D			4	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6018 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6391 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>



### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan Publik. Selama tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti Personal Computer, Laptop, Printer, dan terus mengupdate perangkat lunak yang dikelola sendiri atau oleh Mahkamah Agung serta melakukan sinkronisasi data secara berkala kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :

#### - Implementasi E Court

Implementasi pelaksanaan *e-Court* di PTUN Jakarta, sebagai tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

*E-Court* sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice* serta bersamaan pula dengan wabah Covid -19 yang terjadi di seluruh dunia salah satunya Indonesia. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, menjadi tonggak dalam revolusi administrasi perkara menuju peradilan modern.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, PTUN Jakarta telah menerima 303 (Tiga Ratus Tiga ) perkara gugatan dan 12 (dua belas) perkara permohonan secara *e-Court* baik perorangan (pengguna lain) maupun melalui kuasa hukum/advokat (pengguna terdaftar)

Lahirnya aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* serta upaya hukum banding elektronik merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi berperkara secara elektronik di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Panggilan secara *online*, mengirim dokumen persidangan (jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan) dan Upaya Hukum Banding (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra, Inzage, dan Putusan banding) juga secara *online*. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

*E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online. Aplikasi *e-Court*, *e-litigasi* perkara dan Upaya Hukum Banding Online diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

#### - Implementasi SIPP

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP dari versi 3.1.1 di tahun 2016 sekarang sudah dikembangkan versinya menjadi 4.1.1 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan aplikasi direktori putusan, E-Court, dan memudahkan penginputan data putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam aplikasi direktori Mahkamah Agung, dengan perkembangan tersebut pimpinan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti serta staf kepaniteraan perkara dalam penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



## BAB V

### Peningkatan Pelayanan Publik

#### - Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Rangka Mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka dalam tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :

1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017. maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017., Telah dilaksanakan Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Acara Pembukaan dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh PLH Ketua PTUN Jakarta, Bapak Subur MS, SH., MH, Panitera PTUN Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI). Untuk Pemeriksaan Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh) Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diruang Ketua PTUN Jakarta serta Ruang Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum., dari hasil Pemeriksaan dari TIM Assesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen Badilmiltun, dengan **Hasil Penilaian B.**



2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH Panitera PTUN Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Ibu Hj. Lulik Tri Cahya Ningrum, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badil miltun Mahkamah Agung RI). Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia, Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana pengadilan, E Judicary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan **Hasil Penilaian A (Excellent)**



3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Selasa 10 Desember 2019 bertempat di Birawa Hall, Hotel Bidakara. Penghargaan diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Penghargaan ini diberikan terkait capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *role model* penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik dan karena dianggap telah memenuhi indikator-indikator pencanangan Zona Integritas WBK. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif dan berkualitas. Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program

reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama ini telah melakukan beragam inovasi untuk mewujudkan Zona Integritas antikorupsi WBK/WBBM. Dari perbaikan pelayanan bagi publik, pemasangan spanduk, pengawasan pelayanan, hingga implementasi moto pelayanan antikorupsi bagi semua lini dari staf hingga jajaran pimpinan.



4. Prestasi yang telah dicapai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat predikat juara ke 2 untuk website terbaik dan juara ke 3 lomba inovasi yang di selenggarakan Ditjenbadilmitun ditahun 2021.



Recording | HOST ZOOM 5 is sharing computer sound | Talking

## II. KATEGORI PENILAIAN WEBSITE PENGADILAN

### A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
1	PT TUN MEDAN	90.50
2	PT TUN MAKASSAR	89.00

### A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
1	PTUN JAYAPURA	94.00
2	PTUN JAKARTA	92.50
3	PTUN SERANG	92.00

HOST ZOOM 5 | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIK DAN ADMINISTRASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Recording | HOST ZOOM 5 is sharing computer sound | Talking: HOST ZOOM 5

## V. KATEGORI PENILAIAN INOVASI PENGADILAN

### A. PENGADILAN TINGKAT BANDING

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
1	PT TUN SURABAYA	80.00

### A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
1	PTUN SURABAYA	82.50
2	PTUN DENPASAR	82.25
3	PTUN JAKARTA	82.00
4	PTUN SEMARANG	81.50
5	PTUN JAYAPURA	81.00

HOST ZOOM 5 | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIK DAN ADMINISTRASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA



## **Satu Pintu ( PTSP )**

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 :

### **I. Pasal 11**

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pengarah PTSP

1. Menetapkan Pelayanan PTSP yang meliputi semua administrasi peradilan terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.
3. Mensosialisasikan PTSP kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP.
5. Mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan PTSP.

### **II. Pasal 12**

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola PTSP

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan baik.
4. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.

### III. Pasal 13

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Penanggungjawab PTSP

1. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
3. Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

### IV. Pasal 15

Tugas, tanggungjawab Petugas PTSP

1. Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani :

- Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan.
- Menerima Pendaftaran Permohonan.
- Menerima Pendaftaran Perlawanan.
- Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- Menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Menerima Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
- Menerima pendaftaran permohonan pengawasan eksekusi.
- Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil.
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

2. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :

- Surat Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
- Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
  - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  - Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
3. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas :
- Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Petugas Pelayanan Persidangan bertugas :
- Memberikan informasi dan pelayanan persidangan kepada para pihak / masyarakat pencari keadilan.
5. Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
6. Petugas E Court Corner bertugas :
- a. Pendaftaran E-Court Datang Ke Pengadilan
    - Menerima Gugatan E Court, yang sudah diverifikasi oleh Meja 1;
    - Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
    - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
    - Membuat User & Password Tergugat di Aplikasi E Court;
    - Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E Court ( Non Advokat) ;
    - Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E Court ;
    - Menerima Pendaftaran Advokat terdaftar;
    - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;
    - Konsultasi tentang penggunaan Aplikasi E Court;
  - b. Pendaftaran E-Court tidak Ke Pengadilan
    - Menerima Gugatan E Court, dari Aplikasi E Court;
    - Mencetak dan Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
    - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
    - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court.



## **Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

### **I. PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

### **II. JAM LAYANAN PTSP SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BERIKUT :**

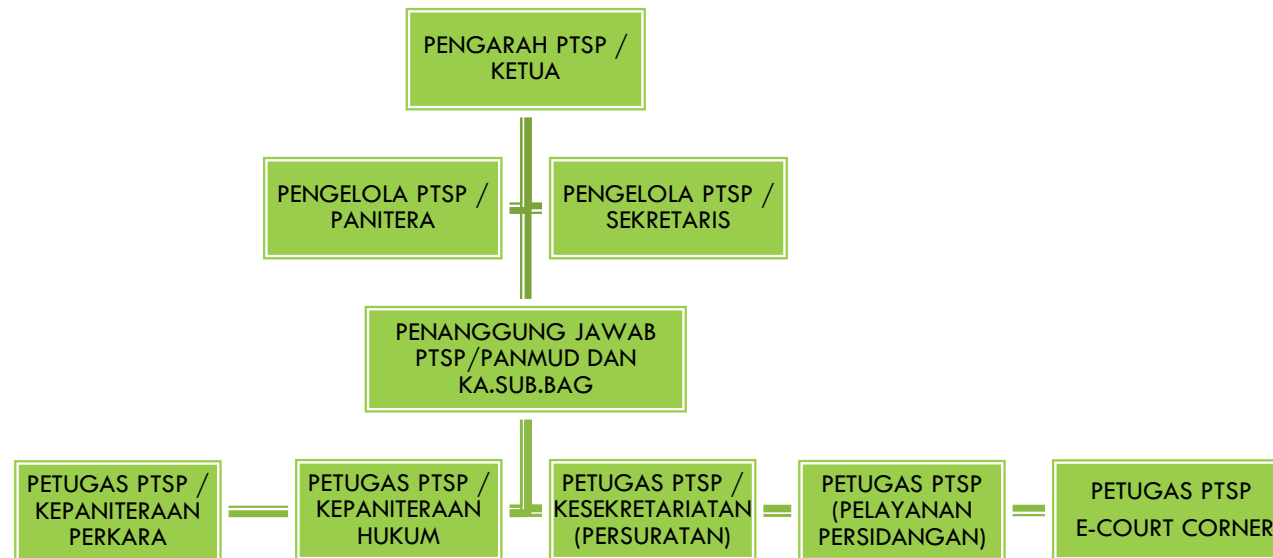
1. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB
2. Jum'at : Pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB

### **III. PENGATURAN MEJA PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Meja PTSP ditempatkan pada loby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
2. Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, termasuk penyandang disabilitas.
3. Di atas meja PTSP harus tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regisiter pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Tulisan PTSP dipasang di dinding belakang/backdrop PTSP.
5. Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Pada setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP yang mengantre atau menunggu.



## STRUKTUR ORGANISASI PTSP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA





## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. PEMUDA NOMOR 66 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR  
TELP. 4805256. FAX. 4803856.  
WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : W2.TUN.1/ 2031 /HM.02.31X/2021

TENTANG

PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Badan Peradilan dibawahnya;
  - Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  - Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  - Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Kedua : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pejabat lainnya yang terkait;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN : Keputusan ini dibenikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 23 September 2021.

KETUA,  
  
  
INDARYADI, SH.MH.  
NIP. 19690225 198103 1 004

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
5. Pegawai yang bersangkutan ;
6. Peringatan ;




Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : WZ.TUN.1/2021/HM.02.31X/2021.  
Tanggal : 23 September 2021.

PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM PTSP
1	INDARYADI, SH.MH.	KETUA	PENGARAH PTSP
2	MUHAMMAD, SH.	PANITERA	PEJABAT PENGELOLA PTSP
3	ONO HARYONO, SE.	SEKRETARIS	
4	HJ. ROMLAH, SH.MH.	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNGJAWAB PTSP
5	SRI HARTANTO, SH.M.Kn.	PANITERA MUDA PERKARA	
6	MILATUL KHANIFAH, SH.	KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN, ORTALAK	
7	TIAS DESCARIASTY, SH.	KA.SUB.BAG.PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
8	IKA SALAHUDDIN, SE.	KA.SUB.BAG.UMUM DAN KEUANGAN	
9	MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md.	STAF KEPANITERAAN PERKARA	KASIR
10	JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md.	STAF KEPANITERAAN PERKARA	MEJA PENERIMAAN DOKUMEN (GUGATAN, PERMOHONAN, BANDING, KASASI, PK, EKSEKUSI DAN SURAT KUASA)
11	NURWITA, A.Md.	STAF KEPANITERAAN PERKARA	MEJA PENYERAHAN DOKUMEN
12	LUDOMIN, SH.	STAF SUB.BAG.UMUM DAN KEUANGAN	PETUGAS TATA KELOLA PERSURATAN
13	PURWOYO, SH.	STAF KEPANITERAAN HUKUM	PETUGAS PELAYANAN PERSIDANGAN, MEJA INFORMASI, PELAYANAN HUKUM DAN PENGADUAN
14	BAGUS NURHADI WIDJOYO.	STAF KEPANITERAAN PERKARA	PETUGAS E-COURT CORNER
15	ANDREW JONATHAN TARIGAN, SH.	STAF KEPANITERAAN PERKARA	

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 23 September 2021.

  
KETUA  
  
INDARYADI, SH.MH.  
NIP.19690225 199103 1 0043

## - Inovasi Pelayanan Publik

Modernisasi peradilan melalui inovasi teknologi informasi merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*Esay of Doing Business*). Bahwa aparaturnya pengadilan tidak hanya dituntut penguasaan ilmu hukum tetapi juga harus menguasai teknologi informasi, dan merubah paradigma pelayanan *one to one* menjadi *one to many*. PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun perangkatnya baik SDM nya maupun infrastrukturnya.

Proses pemeriksaan perkara terlambat maka proses pemberian rasa keadilan akan terhambat, sehingga tidak tercapai asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua dapat tercapai apabila saling bekerjasama, apabila bekerja sendiri-sendiri maka pelaksanaan tugas dan fungsi tidak akan maksimal. Oleh karena itu, PTUN Jakarta membuat inovasi yaitu **SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**, *new e-visitor* (buku tamu), dan *e-case files versi 2* (aplikasi arsip perkara elektronik) berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berikut inovasi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

### 1. Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)

PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi pada awalnya belum memiliki aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi media informasi dan pelayanan secara digital melalui pengembangan aplikasi layanan chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

PTUN Jakarta membuat suatu inovasi berbasis teknologi informasi media informasi digital berupa aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp yang diberi nama **Aplikasi SI PITUNG ( Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan )**.

Chatbot adalah software Artificial Intelligence (AI) yang dapat melakukan percakapan dengan pengguna dalam bahasa yang natural melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Natural di sini maksudnya adalah kita seolah-olah bukan berbicara kepada robot atau sistem, melainkan seperti dengan admin CS pada umumnya. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan instan yang memungkinkan untuk berbagi tidak hanya pesan teks tetapi juga pesan multimedia seperti foto dan video melalui koneksi internet yang banyak digunakan di seluruh dunia dan paling populer dibandingkan aplikasi pengirim pesan lainnya.

Inovasi aplikasi **SI PITUNG ( Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan )** penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP. Aplikasi Chatbot Whatsapp tersebut sepenuhnya optimal dalam memberikan informasi terkait perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, valid dan dapat dipercaya terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PTUN Jakarta. Informasi layanan secara digital diperlukan sehingga optimalisasi aplikasi layanan chatbot Whatsapp dengan melakukan pengembangan baik dalam responsibilitas, publikasi dan data informasi.

Berikut tampilan inovasi Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan).



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

# SI-PITUNG

Sistim pelayanan informasi Terpadu unggulan



**Tahu Kah Anda**

Dapatkan informasi cepat terkait info persidangan anda

 **Hubungi kami**  
**0882-9994-9929**

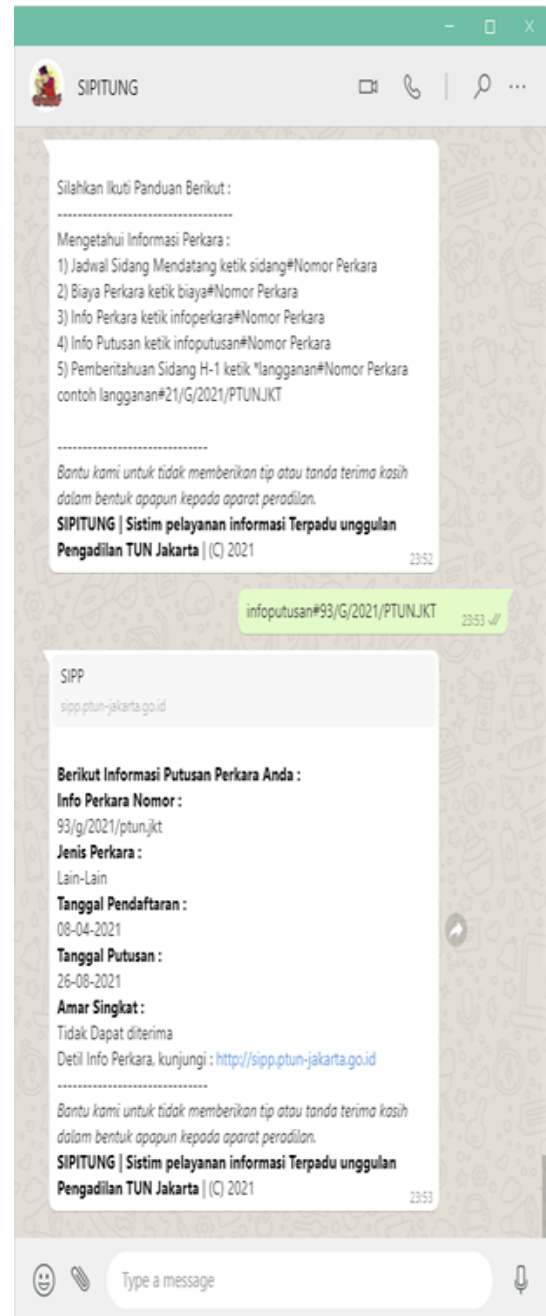
**Layanan ini gratis**

---

**Ayo.. Segera gunakan Aplikasi SI-PITUNG**

Untuk Mengetahui Informasi Perkara :

- 1) Jadwal Sidang Mendatang ketik sidang#Nomor Perkara
- 2) Biaya Perkara ketik biaya#Nomor Perkara
- 3) Info Perkara ketik infoperkara#Nomor Perkara
- 4) Info Putusan ketik infoputusan#Nomor Perkara
- 5) Pemberitahuan Sidang H-1 ketik \*langganan#Nomor Perkara contoh langganan#21/G/2021/PTUN.JKT



SI-PITUNG

Silahkan ikuti Panduan Berikut:

Mengetahui Informasi Perkara :

- 1) Jadwal Sidang Mendatang ketik sidang#Nomor Perkara
- 2) Biaya Perkara ketik biaya#Nomor Perkara
- 3) Info Perkara ketik infoperkara#Nomor Perkara
- 4) Info Putusan ketik infoputusan#Nomor Perkara
- 5) Pemberitahuan Sidang H-1 ketik \*langganan#Nomor Perkara contoh langganan#21/G/2021/PTUN.JKT

Bantu kami untuk tidak memberikan tip atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan.  
**SI-PITUNG | Sistim pelayanan informasi Terpadu unggulan Pengadilan TUN Jakarta | (C) 2021**

infoputusan#93/G/2021/PTUN.JKT

SIPP  
sipp.ptun-jakarta.go.id

**Berikut Informasi Putusan Perkara Anda :**

**Info Perkara Nomor :**  
93/g/2021/ptun.jkt

**Jenis Perkara :**  
Lain-Lain

**Tanggal Pendaftaran :**  
08-04-2021

**Tanggal Putusan :**  
26-08-2021

**Amar Singkat :**  
Tidak Dapat diterima

Detil Info Perkara, kunjungi : <http://sipp.ptun-jakarta.go.id>

Bantu kami untuk tidak memberikan tip atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan.  
**SI-PITUNG | Sistim pelayanan informasi Terpadu unggulan Pengadilan TUN Jakarta | (C) 2021**



## 2. *New e-visitor* (Buku Tamu)

Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang kedua selanjutnya diberi nama *new e-visitor* (buku tamu). PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi *e-visitor* (buku tamu) sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pelayanan pada pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan bermutu.

PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi *e-visitor* telah diperbaharui menjadi *new e-visitor* ( buku tamu ) sehingga dapat mencakup kebutuhan manajemen pelayanan buku tamu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan persidangan. Inovasi *new e-visitor* ( buku tamu ) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya yaitu inovasi aplikasi *e-visitor*. Inovasi *new e-visitor* ( buku tamu ) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan.

Inovasi *new e-visitor* ( buku tamu ) penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi *e-visitor* ( buku tamu ) yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan. Aplikasi *new e-visitor* (buku tamu) merupakan instrumen/alat bantu yang diperlukan dalam menunjang kinerja PTUN Jakarta untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan fitur barcode masyarakat bisa menggunakan smartphone dapat memilih bentuk layanan yang diinginkan.

Berikut tampilan inovasi *Aplikasi New e-visitor* (Buku Tamu).

Tampilan absensi kehadiran para pihak



Barcode Absensi



## Kehadiran pihak yang sudah lengkap

**DETAIL KEHADIRAN PIHAK**

Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN.JKT

Agenda: Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)

Tanggal dan Jam Persidangan: 09-09-2021 - 10:00 WIB

Ruang Sidang: Kartika


**Daftar Para Pihak**


NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BHIAN FAHROJH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>


[← Kembali](#)


## Persidangan yang sedang berlangsung


**Monitoring Persidangan** Monitoring Persidangan > List Monitoring Persidangan

 150/G/2021/PTUN.JKT  
R. Kartika



 RUANG SIDANG KOSONG  
R. Chandra

 RUANG SIDANG KOSONG  
R. Cakra

 RUANG SIDANG KOSONG  
R. Tirta

 RUANG SIDANG KOSONG  
R. Sari

**ANTRIAN PERSIDANGAN**

NO.	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	STATUS	AKSI
1	150/G/2021/PTUN.JKT	Penggugat: DPP PARTAI DEMOKRAT Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAM	<span style="color: green;">Berang</span>	 

## Buku Tamu Pelayanan

### DETIL KEHADIRAN PIHAK

Nomor Perkara	150/G/2021/PTUN.JKT
Agenda	Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)
Tanggal dan Jam Persidangan	09-09-2021 - 10:00 WIB
Ruang Sidang	Kartika

### Daftar Para Pihak

NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IKHWAN FAHROJIH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>

[← Kembali](#)

## Buku Tamu Non Persidangan

Superadmin

### Tamu Non Persidangan

Tamu Non Persidangan > [List Non Tamu Persidangan](#)

LIST TAMU NON PERSIDANGAN

Mulai Tanggal:  Sampai Tanggal:  [Cari](#) [Cetak](#) [Tampilkan Semua](#)

NO	NAMA	PERLUAN	KPERLUAN	FILE KTP	STATUS	TANGGAL MASUK	AKSI
1	Azuli	PNS	Mengajar/Kerja (Bimbel)	<a href="#">Download</a>	<a href="#">Batal Masuk</a>	09-Sep-2021	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Page 1 of 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 03007

## Survey IKM

The screenshot displays the 'Survei IKM' interface. At the top right, there is a user profile icon and the name 'Supriatna'. Below the header, the page title 'Survei IKM' is followed by a breadcrumb 'List Survei IKM'. The main content area features a table titled 'LIST SURVEI IKM' with a search bar containing '10'. The table has the following columns: NO, JENIS KELAMIN, USIA, PENDIDIKAN, PEKERJAAN, JENIS LAYANAN, and AKSI. A single row of data is visible, representing a male respondent aged 22 with a high school education, working as a freelancer, and providing 'Polgyaan P'2P' services. The 'AKSI' column contains three icons: a blue arrow, a green checkmark, and a red 'X'. The page indicates 'Page 1 of 1' and includes a footer for 'Pengembangan Tata Usaha Negara Jakarta ©2021'.

NO	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	22	S3	Freelance	Polgyaan P'2P	

## Survey IPAK

The screenshot displays the 'Survei IPAK' interface. At the top right, there is a user profile icon and the name 'Supriatna'. Below the header, the page title 'Survei IPAK' is followed by a breadcrumb 'Survei IPAK'. The main content area features a table titled 'LIST SURVEI IPAK' with a search bar containing '10'. The table has the following columns: NO, JENIS KELAMIN, USIA, PENDIDIKAN, PEKERJAAN, JENIS LAYANAN, and AKSI. Two rows of data are visible. The first row represents a male respondent aged 25 with a high school education, working as a freelancer, and providing 'Gawling' services. The second row represents a female respondent aged 28 with a high school education, working as a freelancer, and providing 'Polgyaan P'2P' services. The 'AKSI' column contains three icons: a blue arrow, a green checkmark, and a red 'X'. The page indicates 'Page 1 of 1' and includes a footer for 'Pengembangan Tata Usaha Negara Jakarta ©2021'.

NO	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JENIS LAYANAN	AKSI
1	Laki - Laki	25	S3	Freelance	Gawling	
2	Pemempuan	28	S3	Freelance	Polgyaan P'2P	

### 3. *E-Case Files Versi 2* (Aplikasi Arsip Perkara Elektronik)

Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang ketiga selanjutnya diberi nama *e-case files versi 2* (aplikasi arsip perkara elektronik). PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi *e-case files* (aplikasi arsip perkara elektronik) dalam bidang tata kelola arsip yang dimulai dengan digitalisasi arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai backup. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan bidang tata kelola arsip sehingga bisa mencegah kehilangan dokumen persidangan atau kerusakan dokumen dikarenakan termakan usia.

PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi *e-case files* (aplikasi arsip perkara elektronik) telah diperbaharui menjadi *e-case files versi 2* (aplikasi arsip perkara elektronik) dengan menggunakan *web base* aplikasi mudah digunakan untuk pencarian data. Aplikasi ini dibuat dengan tingkat keamanan yang baik seperti dengan pembuat barcode dokumen arsip dan dilengkapi password setiap file untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Aplikasi *e-case files* ini dikembangkan untuk kepentingan internal saja. Berikut tampilan inovasi **Aplikasi *E-Case Files Versi 2* (Aplikasi Arsip Perkara Elektronik)**.

## Tampilan pada *e-case files versi 2*

Manajemen Arsip

No. Perkara	Penggugat	Tergugat	Intervensi	Tanggal	Aksi
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]
25/G/2020/PTUNJKT	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :	15/07/2020	[Aksi]

Menampilkan 1 sampai 10 dari total 21 data

Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya

© 2020 Aplikasi e-Case Files versi 2

### Detail Arsip

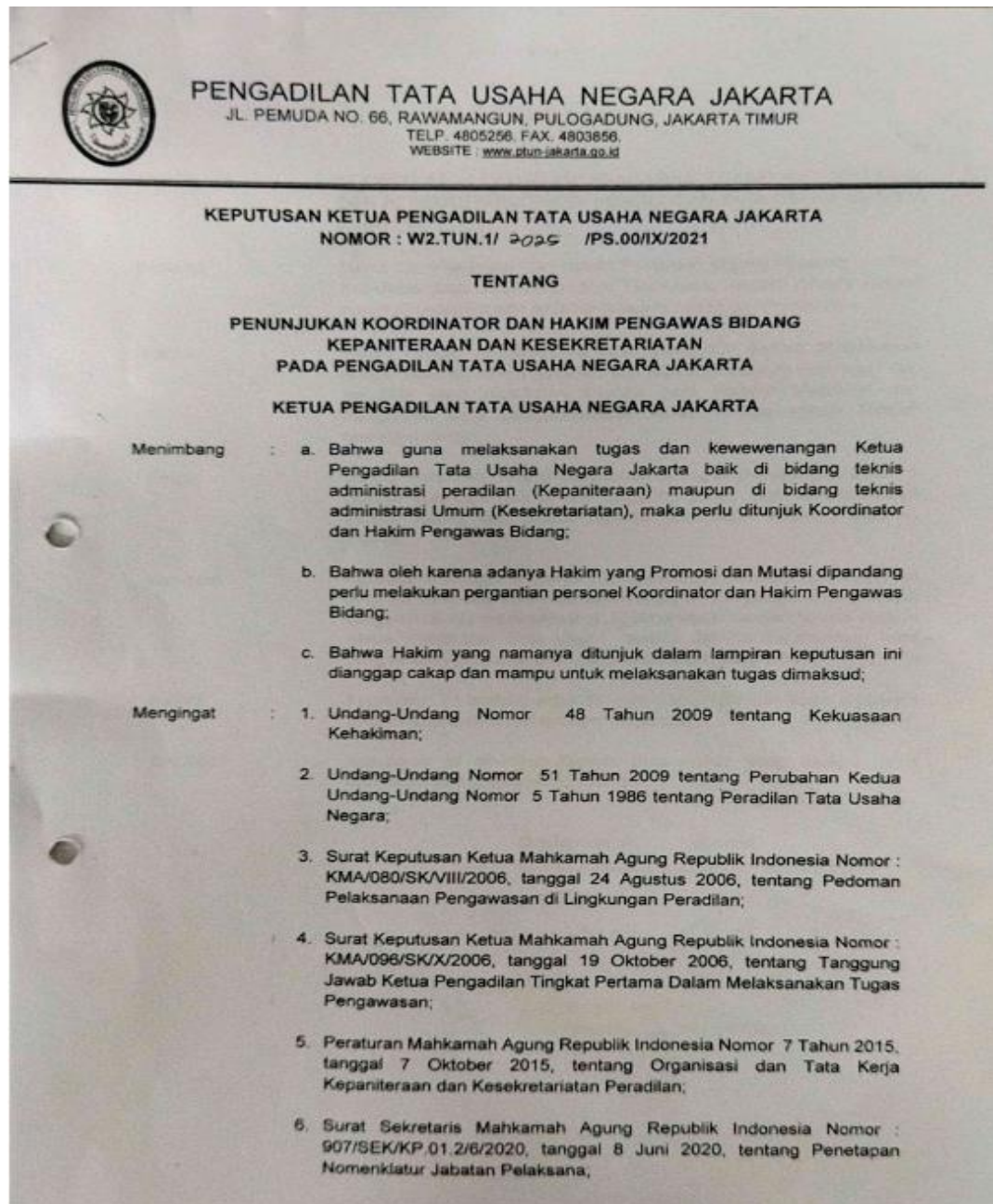
No. Perkara	25/G/2020/PTUNJKT
Klasifikasi Perkara	Lain-lain
Tanggal Daftar	15/07/2020
Penggugat	PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO
Tergugat	Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI
Intervensi	Penggugat Intervensi : Tergugat Intervensi :
Hakim Ketua	Bagus Darmawan, SH., MH
Hakim Anggota 1	M. Arief Pratomo, SH., MH
Hakim Anggota 2	Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, SH., MH
Panitera Pengganti	Agus Widada, SH
Jurusita/Jurusita Pengganti	Murti Handayani Pribadi, Amd
Dokumen Pendaftaran	<a href="#">Unduh</a> <a href="#">Pratinjau</a>
Dokumen Persidangan	<a href="#">Unduh</a> <a href="#">Pratinjau</a>
Dokumen Putusan	<a href="#">Unduh</a> <a href="#">Pratinjau</a>
Keterangan	
Tanggal	15/07/2020 17:37
Data terakhir diubah	
Hits	0 Kali

## BAB VI

### Pengawasan

#### A. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilakukan dalam dua (2) hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.





**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- Pertama** : Menunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan semua pengawasan sesuai Tupoksi bidang tersebut, dan juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional serta petugas-petugas terkait lainnya sesuai Tupoksi masing-masing;
- Ketiga** : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan setiap 6 (enam) bulan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya secara reguler dan tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
- Keempat** : Koordinator Hakim Pengawas Bidang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing, juga membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan para Hakim Pengawas Bidang;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada para Hakim yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 23 September 2021.



**KETUA,**

**INDARYADI, SH.MH.**

**NIP. 19690225 199103 1 0043**



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.  
NOMOR : W2.TUN.1/2025/PS.00/IX/2021.  
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021.

**DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	MUHAMAD ILHAM, SH.MH.	HAKIM	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG

I. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN			
1	DANAN PRIAMBADA, SH.MH.	HAKIM	KEUANGAN PERKARA DAN PTSP
2	SUDARSONO, SH.MH.	HAKIM	ADMINISTRASI PERKARA
3	ELFIANY, SH.M.Kl.	HAKIM	KEPANITERAAN HUKUM DAN LAPORAN PERKARA
4	Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si.SH.MH.	HAKIM	ARSIP PERKARA
5	BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH.	HAKIM	
6	ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH.MH.	HAKIM	
7	MERNA CINTHIA, SH.MH.	HAKIM	
8	I GEDE DEWA PUJA, SH.MH.	HAKIM	

II. HAKIM PENGAWAS BIDANG KESEKRETARIATAN			
1	SUTIYONO, SH.MH.	HAKIM	KEBERSIHAN, KEMANAN, PERLENGKAPAN, DAN INVENTARIS BARANG
2	BUDIAMIN RODDING, SH.MH.	HAKIM	PERPUSTAKAAN DAN PERSURATAN
3	INDAH MAYASARI, SH.MH.	HAKIM	KEUANGAN
4	MOHAMAD SYAUQIE, SH.MH.	HAKIM	
5	PENGGI NURPANJI, SH.		SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
6	Dr. EKO YULIANTO, SH.MH.	HAKIM	PERENCANAAN DAN PELAPORAN
7	SAHIBUR RASID, SH.MH.	HAKIM	
8	ENRICO SIMANJUNTAK, SH.MH.	HAKIM	
9	Dr. NASRIFAL, SH.MH.	HAKIM	INFORMASI TEKNOLOGI, WEBSITE DAN SIPP
10	AKHDIAT SASTRODINATA, SH.MH.	HAKIM	

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 23 September 2021.

  
KETUA,  
  
INDARYADI, SH.MH.  
NIP. 19690225 199103 1 004.3

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Keputusan nomor : W2.TUN1/2025/PS.00/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup administrasi kepegawaian. Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan administrasi lainnya.

Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

## **B. EVALUASI**

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang transparansi maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan, bahwa untuk meminimalisir temuan dan kekurangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Pengawas Bidang harus mengevaluasi masing-masing bidang atau bagian (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) secara berkala, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan persidangan secara elektronik (e-court) dan melakukan Inovasi dengan baik, hal itu harus lebih dikembangkan lagi, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksimalkan dengan baik.

## BAB VII

### Penutup

#### A. KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan harapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan laporan tahunan di tahun 2021 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sangat kompleks di lapangan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung meliputi implementasi program unggulan yaitu SIPP, layanan PTSP, proses perkara secara elektronik (E-Court), kepatuhan terhadap LHKPN dan Mendukung Pembangunan Zona Integritas. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Prestasi yang telah dicapai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat predikat juara ke 2 untuk website terbaik dan juara ke 3 lomba inovasi yang diselenggarakan Ditjenbadilmitun ditahun 2021. Dengan prestasi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi dan pelayanan di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah mengoptimalkannya penggunaan system informasi teknologi informasi, ATP (Audio Text Persidangan)

Ver2, Portal Info Perkara dan saat ini telah di kembangkan Aplikasi yang bernama SI-PITUNG (Sistem Pelayanan Infomasi Terpadu Unggulan), New E-Visitor Book (Buku Tamu Elektronik) serta E-Case Files Versi 2 (Aplikasi Arsip Perkara Elektronik). Dengan adanya inovasi tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada para pihak yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Visi dan Misi yakni terwujudnya Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan Transparan Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIPP dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya peningkatan produktifitas kinerja yang meliputi bidang kesekretariatan dan kepaniteraan. Penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan modal semakin efektif dan efesien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2021 ; keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara rasio dan akuntable

## A. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan pegawai, masih ada Pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merangkap Panitera Pengganti diperbantukan di kesekretariatan;
2. Perlu adanya penambahan pegawai untuk pengelola perpustakaan;
3. Perlu adanya penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2;
4. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam koondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempati;
5. Perlu adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi;
6. Perlu adanya penambahan pegawai untuk di bidang Teknologi Informasi (Pranata Komputer) yang saat ini petugasnya sudah mendapat promosikan di bagian kepaniteraan;
7. Perlu adanya penambahan pegawai di bagian umum dan keuangan yang bertugas sebagai operator aplikasi keuangan dan inventaris kantor, yang saat ini petugas nya sudah mendapat promosikan di bagian kepaniteraan;
8. Perlu adanya penambahan anggaran melalui DIPA untuk penambahan tenaga outsourcing untuk tenaga kebersihan, keamanan, dan supir pimpinan.

Dengan adanya penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sarana dan prasana dapat lebih menunjang penyelesai tugas dan fungsi PTUN Jakarta menjadi lebih optimal.